

RISALAH KEBIJAKAN

Apakah Penyediaan Layanan Dasar Kesehatan di NTB Sudah Adaptif terhadap Dampak Perubahan Iklim?

Graciella Stevani Gulo, Farhan Habibie, dan Muhammad Aldi*

 Oktober 2025

Ringkasan Eksekutif

Sebagai wilayah kepulauan, Nusa Tenggara Barat (NTB) menghadapi risiko tinggi terhadap dampak perubahan iklim khususnya kenaikan muka air laut dan meningkatnya frekuensi banjir rob. Kondisi ini berpotensi mengganggu penyediaan layanan dasar kesehatan, terutama bagi kelompok masyarakat miskin dan rentan. Masalah utama yang muncul antara lain: kesenjangan ketersediaan fasilitas kesehatan dan kepemilikan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang belum sepenuhnya mencakup masyarakat miskin. Risalah kebijakan ini merekomendasikan langkah-langkah berikut: 1) mengintegrasikan aspek risiko perubahan iklim dalam dokumen pembangunan dan tata ruang wilayah provinsi; 2) mengoptimalkan penyediaan layanan dasar kesehatan bagi kelompok miskin dan rentan; dan 3) memperbarui serta mengintegrasikan data lintas sektor agar perencanaan lebih adaptif terhadap risiko iklim.

Kata kunci: layanan dasar, kesehatan, kenaikan muka air laut, adaptif

Latar Belakang

Laporan Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC, 2023), mencatat periode 1901–2018 rata-rata tinggi permukaan laut global terus meningkat. Di Indonesia, laju kenaikan muka air laut diperkirakan mencapai 8–12 mm per tahun (Bappenas, 2021). Dengan wilayah yang terdiri atas sekitar 280 pulau kecil, Provinsi NTB menjadi salah satu daerah yang rentan terhadap dampak perubahan iklim (PRKBI NTB, 2025).

Dampak perubahan iklim di Provinsi NTB dapat dilihat dari seringnya kejadian bencana hidrometeorologi seperti banjir rob. Data dari Satu Data NTB (2025) menunjukkan bahwa sepanjang 2022–2024 terjadi 13 peristiwa banjir rob di wilayah pesisir NTB, frekuensi tertinggi di Kota Mataram dan Kabupaten Bima. Dalam jangka panjang perubahan iklim diperkirakan akan meningkatkan frekuensi dan intensitas banjir sehingga mengganggu penyediaan serta keberlanjutan akses layanan dasar kesehatan di kawasan pesisir NTB.

* Analisis Kebijakan di SKALA dan United Nations Global Pulse Asia Pacific (UNGP AP).

Layanan dasar kesehatan memiliki peran penting terutama bagi penderita penyakit kronis, baik dalam situasi kegawatdaruratan maupun dalam kondisi pra dan pascabencana. Bencana akibat kenaikan muka air laut dapat memperparah kerentanan mereka karena rusaknya infrastruktur kesehatan, terputusnya akses transportasi, dan terhambatnya distribusi obat-obatan. Ketika layanan kesehatan terputus, pasien berisiko mengalami komplikasi karena tidak dapat melakukan kontrol atau memperoleh obat tepat waktu (Berry dan Schnitter, 2022).

Deskripsi Masalah

Kesenjangan Fasilitas Kesehatan

Hasil proyeksi menunjukkan kenaikan muka air laut setinggi satu meter berpotensi berdampak pada enam fasilitas kesehatan, terdiri dari satu puskesmas dan lima klinik kesehatan, terutama di Kota Mataram dan Bima. Sebagai fasilitas layanan kesehatan tingkat pertama, puskesmas dan klinik kesehatan berperan penting dalam memastikan akses layanan dasar bagi masyarakat. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa penyediaan fasilitas kesehatan di wilayah pesisir Provinsi NTB masih belum sepenuhnya mempertimbangkan kerentanan lokasi terhadap dampak perubahan iklim. Hasil wawancara dengan Dinas Kesehatan Provinsi NTB mengungkapkan bahwa analisis risiko iklim terhadap infrastruktur kesehatan belum pernah dilakukan secara sistematis.

Pada 2024, Provinsi NTB memiliki 176 puskesmas yang tersebar di seluruh kabupaten/kota. Berdasarkan rasio ideal satu puskesmas dapat melayani 30.000 penduduk, sementara jumlah tersebut masih belum mencukupi. Mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) NTB 2025, kebutuhan ideal mencapai 241 puskesmas. Artinya, dibutuhkan tambahan 65 puskesmas dalam 20 tahun ke depan untuk memenuhi

Risalah kebijakan ini memaparkan kondisi layanan kesehatan di NTB terhadap risiko kenaikan muka air laut. Selain itu, memberikan rekomendasi kebijakan untuk memperkuat kapasitas adaptasi sistem kesehatan di daerah rentan.

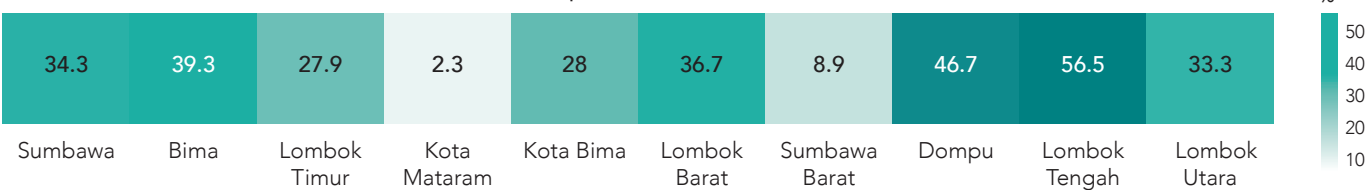
kebutuhan penduduk. Jika sebagian fasilitas kesehatan hilang atau rusak akibat kenaikan muka air laut maka capaian pembangunan daerah akan terganggu. Selain itu, kesenjangan layanan kesehatan dasar antarwilayah akan semakin melebar.

Cakupan kepemilikan JKN Belum Merata pada Masyarakat Miskin

Data Dinas Kesehatan Provinsi NTB 2023 menunjukkan cakupan kepesertaan JKN telah mencapai 97,31%. Meskipun capaian ini tergolong tinggi, perluasan kepesertaan tetap menjadi agenda penting, khususnya bagi kelompok masyarakat miskin dan rentan.

Proyeksi kenaikan muka air laut satu meter berpotensi berdampak pada 1.122 penderita penyakit kronis di NTB yang belum terdaftar JKN. Distribusi tertinggi di Kabupaten Lombok Tengah 56,52% dan Kabupaten Dompu 46,67% (Gambar 1). Dari jumlah tersebut, 465 orang tergolong miskin dan rentan serta mayoritas adalah perempuan usia produktif (65,2%) dan lansia (32,1%) sehingga akses perawatan kesehatan berisiko semakin terhambat.

Gambar 1. Persentase Penduduk Berpenyakit Kronis yang Tidak Memiliki Jaminan Kesehatan



Sumber: Data Regsosek, 2022

Kebijakan yang Disasar

- Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi NTB 2025–2045 telah memuat arah kebijakan layanan kesehatan bagi seluruh masyarakat. Akan tetapi, dokumen ini perlu diperkuat dengan integrasi aspek perubahan iklim agar kebijakan yang dihasilkan lebih adaptif dan berkelanjutan.
- Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi NTB 2024–2044 telah memuat program penyediaan fasilitas pelayanan serta sarana pendukungnya. Namun, pemilihan lokasi pembangunan masih perlu mempertimbangkan aspek keamanan dan risiko terhadap dampak perubahan iklim.

Rekomendasi Kebijakan

Berdasarkan hasil kajian terhadap potensi dampak kenaikan permukaan dan analisis kebijakan,¹ rekomendasi yang dapat diberikan adalah sebagai berikut.

1. Pengintegrasian risiko perubahan iklim dalam dokumen pembangunan dan tata ruang

Pemerintah Provinsi NTB perlu mengintegrasikan analisis risiko perubahan iklim ke dalam dokumen perencanaan pembangunan dan RTRW. Langkah ini penting untuk memastikan fasilitas kesehatan dibangun di lokasi yang aman dan adaptif, serta menjadi dasar koordinasi antar lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan penyaluran bantuan yang tepat sasaran.

2. Pengoptimalan layanan dasar kesehatan bagi kelompok miskin dan rentan

Perlu percepatan perluasan kepesertaan JKN dan penguatan layanan kesehatan pada seluruh tahapan penanganan bencana: pra, saat, dan pascabencana. Fokus diarahkan pada kelompok rentan seperti lansia dan perempuan agar akses terhadap layanan tetap adil dan berkelanjutan.

3. Pemutakhiran dan pengintegrasian data lintas sektor untuk mendukung perencanaan yang lebih adaptif

Diperlukan sistem data terintegrasi yang menggabungkan informasi kesehatan, sosial, dan iklim untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis bukti. Sistem ini akan membantu perencanaan spasial yang lebih adaptif, efisiensi alokasi anggaran, dan penguatan koordinasi antar-OPD. Pemutakhiran dan integrasi data juga perlu diarahkan pada keluarga miskin yang belum memiliki JKN. Data Lintas Sektor tersebut perlu menjadi bagian dari siklus data daerah yang dikelola oleh Forum Satu Data Daerah dengan memanfaatkan Portal Data Daerah.

¹ Dilaksanakan oleh Bappenas dan Kementerian Dalam Negeri yang didukung oleh Program SKALA dan United Nations Global Pulse.

Disclaimer: Pandangan, temuan, interpretasi, dan rekomendasi yang disampaikan dalam publikasi ini tidak serta merta mencerminkan kebijakan atau posisi resmi Pemerintah Indonesia, Pemerintah Australia, atau DT Global. Program SKALA didukung oleh Departemen Luar Negeri dan Perdagangan (DFAT) Australia dan dikelola oleh DT Global.

